

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Golongan Karya mulai diorganisasi sejak akhir dekade 1950 – an untuk memberi bentuk terhadap gagasan kolektivitas dalam perpolitikan Indonesia. Tahun 1957, gagasan ini merupakan alternatif terhadap partai politik yang dimaksudkan untuk digantikannya atau dipinggirkannya. Sukarno mengusulkan untuk menggantikan partai partai pada saat itu (PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI) dengan Golongan Karya atau yang pada saat itu dikenal sebagai “Golongan Fungsional”. Beliau merupakan orang yang meluncurkan gagasan Golongan Fungsional ke dalam perpolitikan Indonesia pada 1956 – 1957<sup>1</sup>.

Sukarno mengembangkan diskursus politik yang mengusulkan untuk mengubur partai partai atau menggantikannya dengan golongan fungsional. Konsep ini mewakili golongan – golongan yang memiliki fungsi dalam masyarakat di dalam keseluruhan kolektivitas<sup>2</sup>. Sejak 1960 – 1965 angkatan darat terus mengembangkan organisasi organisasi golongan fungsional. Organisasi yang dibentuk seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO). Banyaknya



---

David Reeve. *GOLKAR Sejarah yang hilang* (Jakarta: Komunitas Bambu, ii – xviii.

Reeve, *GOLKAR Sejarah yang hilang*, Xvii – xx.

organisasi golongan fungsional yang berbeda beda disatukan ke dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR) pada 1964<sup>3</sup>.

Hingga pada tahun 1965 semakin banyak organisasi yang berafiliasi kedalam Sekber Golkar. Sebanyak 64 buah Organisasi pada tahun 1965, selanjutnya jumlah tersebut bertambah menjadi 128 organisasi tahun 1966, tahun 1967 menjadi 252 organisasi hingga pada akhir tahun 1969 ada 200 organisasi fungsional yang tergabung ke dalam Sekber Golkar<sup>4</sup>. Kaum militer memanfaatkan organisasi ini sebagai basis dukungan massa. Dengan begitu, mulailah militer untuk mengelompokkan organisasi organisasi ini ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) pada 1969<sup>5</sup>. Adapun ketujuh KINO tersebut, ialah :

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO).
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
4. Organisasi Profesi.
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM).
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI).



---

Reeve, *GOLKAR Sejarah yang hilang*, xxi.

Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta : PT rajagrafindo persada, 2015),

Rodee, C Dkk, *Pengantar Ilmu Politik* ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, m. 488

## 7. Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971<sup>6</sup>.

Sekber Golkar pada pemilu 1971 mempunyai 201 organisasi anggota. Dalam restrukturisasi pada akhir 1971, KINO dilebur menjadi organisasi tunggal dengan nama sederhana, yaitu “Golongan Karya” (GOLKAR). Pada Januari 1973, partai-partai harus mengikuti pembagian yang disarankan pemerintah kepada mereka. Empat partai Islam (NU, PARMUSI, PSII, Perti) dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelima partai lain (PNI, IPKI, Murba, Katolik dan Kristen) dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pembagian ini dinamakan Fusi Partai<sup>7</sup>.

Sekitar tahun 1950 sampai 1965 di daerah Sulawesi Selatan terjadi pertentangan antar elit politik yang didasarkan atas perbedaan aliran politik. Disamping itu juga terjadi pemberontakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) dan PERMESTA (Perjuangan Semestas) di Sulawesi Selatan. Terjadi juga konflik antar partai yang berasaskan aliran politik dalam mendapatkan kekuasaan, baik sebelum maupun sesudah PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1955. Partai politik yang beraliran politik Islam, seperti MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdatul Ulama), dan PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia) bersaing dengan partai politik yang beraliran nasionalis dan komunis dalam memenangkan PEMILU. Hasil pemilu 1955



Dewa Ayu Diah Tri Paramita Putri Nida, “Hubungan Antara Komitmen dan Perilaku Kewargaan Organisasi pada Fungsionaris Partai Golkar di *rnal Psikologi Udayana* 1, no. 2 (2014): 9.

David Reeve. *GOLKAR Sejarah yang hilang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 3 – 351.

menunjukkan bahwa partai politik yang beraliran Islam memperoleh kemenangan 90 persen, sedangkan partai politik yang beraliran nasionalis, komunis, dan partai-partai kecil hanya membagi habis 10 persen sisa suara lainnya. Bahkan MASYUMI sendiri mampu memperoleh 72 persen suara<sup>8</sup>.

Kondisi politik kepartaian di Sulawesi Selatan mulai bergejolak ketika dekrit presiden pada tanggal lima Juli 1959. Peralihan sistem ini berdampak luas dan berpengaruh langsung terhadap perkembangan politik di Sulawesi Selatan<sup>9</sup>. Sejak dekrit itu, perangkat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah mengalami penataan ulang dan penyesuaian kembali ke sistem yang berdasarkan UUD 1945. Pembubaran partai politik Masyumi dan PSI mengharuskan kursi-kursi yang tadinya diduduki mereka harus digantikan oleh Golongan Karya<sup>10</sup>.

Keadaan partai-partai politik dan kekuatan politik tersebut bertahan sampai diselenggarakannya pemilu pertama orde baru. Pada tahun 1971, Amir Machmud (Menteri dalam negeri) melakukan “Politik bulldozer” dengan kebijakan “Monoloyalitasnya” dimana seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk menjadi anggota partai politik, akan tetapi seluruh PNS saat itu diwajibkan untuk menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang tujuan akhirnya



---

<sup>8</sup> Jayadi Nas, “Konflik antar elite politik lokal di Sulawesi Selatan : Sebuah f Sejarah”. *Jurnal Pendidikan Sains dan Kemanusiaan* 2, no. 7 (2014) : 10. Zainuddin Taha, *SULAWESI SELATAN dari A. Achmad Rifai ke Achmad 50 – 1970* (Makassar : Badan Penerbit UNM, 2017), 19. Taha, *SULAWESI SELATAN dari A. Achmad Rifai ke Achmad Lamo 1960 –*

menjadikan Sekber Golkar menjadi kekuatan pemenang tunggal dalam setiap pemilu orde baru<sup>11</sup>.

Tak hanya itu, suara golongan karya juga meledak dikarenakan adanya tim yang ditugaskan oleh orde baru yaitu Ali Murtopo, Amir Mahmud, dan Kopkamtib untuk mengawal kemenangan Golongan Karya pada pemilu 1971. Para perwira militer dan pejabat pejabat yang turun ke desa diwajibkan menarik suara dalam jumlah yang sudah ditentukan. Intimidasi disebarluaskan, para pemilih pun yang tidak percaya kepada islam, memilih Golongan Karya<sup>12</sup>.

Golongan Karya pada pemilu 1971 di Sulawesi Selatan memperoleh suara terbanyak. Perolehan suara yang berhasil dikantongi pada waktu itu mencaapai tiga perempat bagian dari total suara. Partai-partai politik lain yang bercorak keagamaan tidak mampu menyaingi Golongan Karya. Hal ini sungguh mengherankan dikarenakan pada pemilu 1955 yang menjadi pemenang adalah partai yang bercorak keagamaan. Dengan proposisi kemenangan mutlak yang diperoleh Golongan Karya tersebut, pola kemenangan partai dan kelompok yang merujuk pada identitas keagamaan pada pemilu 1955 tergeser. Keadaan tersebut bertahan hingga sampai pada pemilu



---

Taha, *SULAWESI SELATAN dari A. Achmad Rifai ke Achmad Lamo 1960 –*

<sup>12</sup> Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004* (Jakarta : Gramedia, 2007), 585.

selanjutnya. Setiap pemilu yang dilaksanakan pada masa orde baru Golongan Karya selalu keluar sebagai pemenang.

Bagaimana Hal itu bisa terjadi ?, Golongan Karya yang awalnya hanyalah sebuah sekumpulan organisasi yang mewakili golongan fungsional dan menyatukan diri sehingga menjadi SEKBER GOLKAR lalu kemudian menjadi kekuatan politik yang sangat besar di Sulawesi Selatan pada masa orde baru. Besarnya kekuatan Golongan Karya mampu memenangi seluruh pemilu yang dilaksanakan pada masa orde baru mulai tahun 1971 – 1987.

Maka dengan latar belakang permasalahan yang penulis paparkan, tulisan ini berupaya untuk melacak bagaimana Golongan Karya sebagai organisasi politik pada masa orde baru mampu menjadi kekuatan yang sangat besar pada tiap pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.



## 1.2 Rumusan Masalah

Seorang peneliti sejarah harus merumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian. Hal itu dilakukan agar mempermudah peneliti sejarah dalam mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan sesuai dengan topik dan periode yang ditentukan. Permasalahan yang penulis akan sampaikan dalam penelitian ini mengenai Golongan Karya sebagai organisasi politik di Sulawesi Selatan 1971 - 1987. Berkaitan dengan hal ini maka penulis telah merumuskan masalah-masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitiannya.

Berikut adalah paparan masalah yang ingin dikaji oleh penulis:

1. Mengapa Golongan Karya yang relatif baru di Sulawesi Selatan, mampu memenangkan pemilu 1971 – 1987 ?
2. Bagaimana persebaran kader Golongan Karya pada DPRD tingkat satu di Sulawesi Selatan 1971 – 1987?

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian penulis hendaknya melakukan pembatasan terhadap objek kajiannya. Batasan masalah dalam penelitian sejarah sendiri terbagi menjadi dua yaitu batasan temporal (batasan waktu) dan batasan spasial (batasan tempat/wilayah).

Pembatasan ini dilakukan untuk memfokuskan kajiannya serta membantu peneliti agar peneliti terlalu luas baik waktu maupun wilayah.



### 1.3.1. Batasan Temporal

Penelitian ini akan memfokuskan penelitiannya pada masa orde baru tepatnya tahun 1971 - 1987. Penulis memilih kurun waktu tersebut karena pada periode tersebut terjadi perkembangan yang sangat signifikan terhadap Golongan Karya. Mulai pada pemilu pertama yang diikuti Golongan Karya 1971 hingga pemilu tahun 1987, Golongan Karya selalu memenangkannya.

### 1.3.2. Batasan Spasial

Batasan spasial atau batasan wilayah pada penelitian ini adalah provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan provinsi ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi lumbung suara bagi Golongan Karya pada masa orde baru.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana srata satu di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
2. Untuk mengetahui mengapa Golongan Karya yang relatif baru di Sulawesi Selatan mampu mengalahkan partai partai berbasis keagamaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana persebaran kader Golongan Karya di parlemen

Sulawesi Selatan 1971 – 1987.



## 1.5. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sejarah Golongan Karya sebagai organisasi politik di Sulawesi Selatan 1971 - 1987, sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji dimensi yang sama.
- 2) Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan sejarah, sehingga bermanfaat menambah informasi mengenai sejarah Golongan Karya sebagai organisasi politik pada masa orde baru.

### b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

## 1.6. Tinjauan Pustaka

### 1.6.1. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian yang sudah ada yang cukup relevan dengan penelitian saat ini. Penelitian yang membahas perkembangan partai politik di suatu daerah cukup banyak diteliti oleh peneliti sia. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian baik di internet maupun di



perpustakaan yang ditemukan oleh penulis. Namun penulis belum menemukan penelitian yang terkhusus membahas Golongan Karya sebagai organisasi politik di Sulawesi Selatan 1971 - 1987. Oleh karena itu, penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah yang cukup relevan.

Penelitian pertama berupa buku yang berjudul “*GOLKAR : Sejarah yang hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika*”. Buku ini ditulis oleh David Reeve. Beliau merupakan seorang sejarawan sekaligus peneliti yang berasal dari Australia. David Reeve mengajar di program studi kewilayahan Australia di Universitas Indonesia pada 1980-an. Reeve diangkat sebagai Resident Director program ACICIS bagi mahasiswa Australia yang belajar di Universitas-universitas di Indonesia selama tiga tahun pada era 1990-an, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang<sup>13</sup>. Penelitian ini membahas mengenai gagasan awal dan akar pemikiran dari terbentuknya Golongan Karya hingga sampai besarnya kekuatan golongan karya di pemerintahan orde baru. Data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari data yang tersimpan dalam perpustakaan fisher, perpustakaan nasional Australia dan perpustakaan Universitas Monash. Penulis juga berkunjung secara langsung ke Indonesia guna mencari data. Di Indonesia ia menemukan karya karya ilmiah tentang Sejarah Indonesia modern, serta surat kabar Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis terletak pada konteks tempat dan pokok bahasan



---

KOMUNITAS BAMBU, *David Reeve*,  
[munitasbambu.id/en/?mas\\_static\\_content=david-reeve](http://munitasbambu.id/en/?mas_static_content=david-reeve) diakses pada 19 Mei

masalah yang dimana penulis akan melihat lebih spesifik dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Penelitian kedua berupa skripsi yang berjudul “*Nahdlatul ulama tidak berpolitik : praktik politik dan sebaran kader nahdlatul ulama di parlemen Sulawesi selatan 1984 – 1998*”. Skripsi ini di tulis oleh Muhammad Amin. Seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Sejarah (Sekarang alumni). Penelitian ini secara umum menjelaskan Nahdlatul ulama tidak berpolitik dan sebaran kader nahdlatul ulama di parlemen Sulawesi Selatan 1984 – 1998. Fokus penelitian ini kader NU yang berada pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kader NU Kembali berpolitik setelah NU tidak berpolitik sejak khittah 1984 dan membangun basis massa di Sulawesi Selatan. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari penelusuran arsip dan data wawancara. Selain itu, ia juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Penulis merasa skripsi ini merupakan penelitian yang penting dikarenakan adanya kesamaan dengan yang akan penulis tulis. Skripsi ini merupakan kajian Sejarah politik, sama dengan yang penulis akan tulis dan bertempat di Sulawesi Selatan. Akan tetapi berbeda dari konteks masalah dan focus penelitian.

Penelitian ketiga berupa Jurnal yang berjudul “*Analisis kekuatan Golkar pada de baru*”. Jurnal ini di tulis oleh Muhamad Wildan Djakiyu. Ia adalah seorang yang berkuliah di Universitas Jenderal Soedirman dan mengambil jurusan politik. Fokus penelitian ini ialah menggambarkan bagaimana kekuatan dan



kelemahan Golongan Karya pada rezim orde baru di Indonesia. Adapun data dari jurnal ini diperoleh dari kajian literatur yang bersumber dari beberapa jurnal dan buku. Penulis merasa penting dengan adanya penelitian ini dikarenakan adanya persamaan dengan penelitian yang akan penulis tulis. Persamaannya terletak pada konteks periodisasi yang sama sama orde baru dan sama sama membahas mengenai golongan karya. Hal yang membedakan ialah Konteks masalah dan focus penelitian yang penulis ingin meneliti lebih spesifik bagaimana di Sulawesi Selatan.

#### 1.6.2. Landasan Konseptual

Perkembangan partai politik sejak awal hingga berakhirnya masa orde baru mengalami pasang surut dalam pembangunan bangsa khususnya peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam segenap aspek kehidupan pembangunan nasional. Secara umum, terdapat tiga pendekatan untuk memahami asal usul partai politik, pendekatan itu adalah pendekatan institusional, pendekatan historis, dan pendekatan modernisasi.

Teori institusional memandang bahwa lahirnya partai politik dari dua arah yaitu partai politik yang tumbuh dari dalam parlemen dan partai politik yang tumbuh dari luar parlemen. Sementara itu, teori historis dalam pandangannya memberi tekanan pada krisis-krisis sistemis yang berkaitan dengan proses pembangunan bangsa

ya krisis yang berkaitan dengan integrasi nasional, legitimasi bangsa dan partisipasi yang lebih besar. Teori selanjutnya adalah teori modernisasi unan politik. Menurut teori ini, partai politik merupakan sebagai produk dari



adanya modernisasi di bidang sosial dan ekonomi karena ada sebuah formulasi yang mengatakan bahwa partai-partai massa adalah produk dari modernisasi sosial. Dalam masyarakat modern, partai politik muncul hanya dengan maksud memobilisasi massa saja tetapi tidak memiliki maksud untuk mengadakan suatu revolusi<sup>14</sup>.

Pada tahun 1966 sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin dan lahirnya orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi pancasila. Presiden Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, selama berkuasa Soeharto mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan cara kepemimpinannya yang pancasila sebagai ideologi satu-satunya bagi setiap organisasi masyarakat hanya dijadikan sebagai alat dan permainan politik Soeharto untuk memberantas sejumlah tokoh dan pers yang memberikan kritik terhadap pemerintahannya. Begitu juga dengan pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru hanya sebagai simbol yang bertujuan untuk kemenangan peserta tertentu, bahkan telah keluar dari nilai-nilai demokratis<sup>15</sup>.

Golongan karya yang pada mulanya disebut sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya, lahir dari usaha untuk menggalang organisasi-organisasi

---

<sup>14</sup> Arif Hidayat, "Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru 1966 – *rnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018), 2 – 4.

Arif Sugitanata, "Sistem Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia : de lama, orde baru, dan reformasi" *QAUMIYYAH : Jurnal Hukum Tata Niversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* 2, no. 1 (2021), 6.



masyarakat dan angkatan bersenjata, muncul satu tahun sebelum peristiwa G30S/PKI pada tanggal 20 Oktober 1964. Organisasi ini lahir dari pusat dan dijabarkan sampai kedaerah-daerah. Disamping itu, untuk tidak adanya loyalitas ganda dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil maka Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang lahir tanggal 29 Nopember 1971 ikut menggabungkan diri ke dalam Golongan Karya. Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun, tidak ada satupun kritik dari infra struktur politik yang berani mengusiknya. Digolkar, Soeharto diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina, yaitu kekuasaan tertinggi di tubuh organisasi itu.

Para pemerhati politik di Indonesia melihat bahwa fungsi partai politik di Indonesia tidak berkembang menurut sewajarnya. Walaupun Golongan Karya senantiasa menang mayoritas pada setiap pemilu, tapi partai tersebut tidak dapat memainkan peranannya dalam pemerintahan karena kebanyakan jabatan-jabatan dalam pemerintahan tidak diberikan kepada golongan karya tetapi kepada orang-orang yang terdekat dengan Soeharto seperti teman-teman atau keluarganya. Ini bertujuan agar kekuasaan negara tetap terpusat seluruhnya di tangan Soeharto.

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk menemukan jalan untuk pemecahan permasalahan yang akan ditulis sistematis untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik. Penelitian ini akan metode sejarah yang mana penulis mengumpulkan data untuk menarik



suatu kesimpulan dari kejadian masa. Kunto wijoyo memaparkan beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber verifikasi (kritik sumber), interpretasi: analisis dan sintesis dan yang terakhir adalah penulisan<sup>16</sup>.

### 1. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan semua sumber sejarah yang ada, baik itu primer maupun sekunder. Sumber Sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis Sejarah yang akan ditulis<sup>17</sup>. Sebagai sumber penelitian, penulis menggunakan sumber berupa arsip, surat kabar sezaman, dan buku terbitan sezaman yang penulis dapatkan dari kantor dinas kearsipan provinsi Sulawesi Selatan, Kantor DPD tingkat satu Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, serta Perpustakaan Abdurrasyid Daeng Lurang yang terletak di Kabupaten Gowa. Penulis juga mengumpulkan beberapa sumber sekunder melalui kajian literatur seperti jurnal, dan buku bacaan yang sesuai dengan fokus penelitian penulis. Semua sumber tersebut, penulis dapatkan dari ruang baca Fakultas Ilmu budaya (FIB) Universitas Hasanuddin, ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, serta internet sebagai wadah untuk mencari jurnal dan bacaan tambahan. Selain itu, Penulis juga menerapkan metode Sejarah lisan berupa wawancara kepada saksi Sejarah, dalam hal ini orang yang hidup pada masa orde baru.



---

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995),

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 73.

## 2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber merupakan kegiatan untuk menguji kebenaran atau keaslian dari sumber-sumber sejarah yang didapatkan. Verifikasi ada dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ialah proses kritik terhadap penampilan luar dari sumber Sejarah entah itu kertasnya, tintanya, kata-katanya, hurufnya, guna mengetahui keaslian sumbernya. Sedangkan kritik Intern ialah, kritik yang dilakukan guna menguji kebenaran dari suatu sumber<sup>18</sup>. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara membandingkan sumber yang ada dengan sumber yang lain, apakah sumber pertama tersinkronisasi dengan sumber yang lain atau tidak, jika tidak ada keraguan di dalamnya, maka sumber tersebut asli.

## 3. Interpretasi

Setelah melakukan Kritik Sumber, selanjutnya penulis melakukan Interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran data atau disebut juga analisis sejarah, yaitu penggabungan atas sejumlah fakta yang telah diperoleh. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh sebelumnya dari sumber-sumber sejarah dan bersamaan dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi secara menyeluruh. Melalui interpretasi, maka akan menghasilkan



---

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 77 – 78.

pandangan yang baru terhadap Sejarah tersebut, atau sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### 4. Penulisan Sejarah

Tahap terakhir yang dilakukan oleh penulis ialah penulisan sejarah. Dalam penulisan Sejarah, aspek kronologis adalah hal yang sangat penting. Penyajian penelitian Sejarah dalam bentuk tulisan menyajikan paling sedikit 3 bagian yaitu pengantar, pembahasan, dan simpulan<sup>19</sup>. Tahap ini dilakukan setelah semua data terkumpul dan telah diuji keabsahannya. Bentuk dari rekaman dan peninggalan masa lampau ini akan disusun secara sistematis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah dimengerti dengan tujuan agar pembaca mudah memahaminya. Sumber sumber tersebut juga akan disajikan dalam bentuk narasi Sejarah.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan tulisan yang tersusun secara kronologis maka dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya dalam lima bab yang dibuat secara sistematis.

**Pada Bab I** dijelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang mengapa penulis mengambil judul skripsi yang diajukan. Selain itu dalam bab satu ini juga menjelaskan tentang batasan masalah dan rumusan masalah. Dalam batasan masalah,



---

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* , 80 – 81.

penulis menjelaskan mengapa pada periode tersebut dipilih dan juga pada daerah yang dipilih. Rumusan masalah menjelaskan tentang masalah yang akan penulis kaji didalam tulisannya. Metode Penulisan menjelaskan tentang metode yang digunakan penulis selama meneliti.

**Pada Bab II** memuat Gambaran umum mengenai kondisi politik yang ada di Indonesia dan Sulawesi Selatan sebelum dan setelah 1971. Juga terbahas lahirnya Golongan Karya di Sulawesi Selatan.

**Pada Bab III** akan membahas strategi kemenangan Golongan Karya tiap pemilu orde baru dan persebaran kader Golongan Karya di DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan setelah pemilu 1971 & 1977

**Pada Bab IV** akan membahas persebaran kader Golongan Karya di DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan setelah pemilu 1982 & 1987

**Pada Bab V** adalah hasil dari penjabaran dari bab satu sampai bab empat, maka dari situlah bisa ditarik kesimpulan oleh penulis. Kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah di atas, sekaligus menutup penelitian ini yang terangkum dalam bab akhir.



## BAB II

### Golongan Karya di Sulawesi Selatan

#### 2.1 Kondisi Politik di Indonesia Sebelum dan Setelah 1971

Pada awal tahun 1950an, para politikus sipil membentuk suatu sistem parlementer yaitu sistem multi partai yang kemudian mendapatkan kursi di DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara). Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang pemerintahan yang kuat dikarenakan DPRS telah gagal menstabilkan politik dan ekonomi negara, serta tertundanya pemilu yang dianggap sebagai upaya DPRS untuk mempertahankan kekuasaannya. Pembubaran DPRS dan pemilu menjadi isu yang diangkat pada peristiwa 17 Oktober 1952<sup>20</sup>. Atas peristiwa tersebut, April 1953 undang undang pemilu akhirnya disahkan kemudian ditetapkan pelaksanaannya pada September 1955<sup>21</sup>.

Pemilu 1955 ternyata tidak menghasilkan apa apa. Struktur sosial dan politik negara kini mulai hancur. Keadaan sangat kacau, pemberontakan dimana mana dan krisis di daerah semakin serius. 2 maret 1957, panglima untuk Indonesia Timur, Letnan Kolonel H.N.V Sumual, mengumumkan keadaan darurat perang di seluruh wilayahnya



---

<sup>20</sup> Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan peristiwa demonstrasi besar besaran kukan oleh A.H Nasution dan tujuh panglima daerah serta ribuan at untuk menuntut dibubarkannya DPRS dan disegerakan melakukan

Ricklefs, M,C, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008* , (Serambi, 2008), 2.

dari markas besar yang ada di Makassar. 14 Maret 1957, Soekarno mengumumkan ke seluruh Indonesia keadaan darurat perang. Akhirnya demokrasi parlementer yang telah berjalan dari 1950an ini tumbang<sup>22</sup>.

28 Oktober 1956, Soekarno membuat pernyataan dalam pidatonya untuk “mengubur partai partai”. Usulan untuk mengubur partai partai untuk menyadarkan partai partai supaya mengoreksi diri. Kemungkinan pembubaran partai tersebut tetap ada dan akan digantikan dengan konsep “Golongan Fungsional”. Golongan Fungsional memberikan harapan bagi mereka yang berdiri atas nama etnis, sosial, agama, dan ideologi. Dibandingkan dengan sistem partai yang penuh kubu dan menghasilkan perpecahan. Bagi Sukarno, golongan fungsional merupakan bentuk perwakilan yang lebih baik dan juga cara menyerang partai secara tidak langsung, daripada membuat rencana untuk membubarkannya. Hingga tepat 5 Juli 1959, Sukarno membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 melalui dekrit Presiden<sup>23</sup>.

Pada maret 1960, Sukarno mengumumkan bahwa akan membentuk DPR yang baru yang nantinya akan diberi nama DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). DPR-GR ini nantinya akan berisi 130 anggota partai dan 130 golongan fungsional. Dalam komposisi DPR-GR ini, golongan fungsional memiliki setengah



---

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, 521 – 531.  
David Reeve, *GOLKAR Sejarah yang hilang*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 5 – 140.

dari perwakilan, tetapi sepertinya komposisi ini hanya digunakan untuk tujuan politik jangka pendek<sup>24</sup>.

Ideologi dwifungsi ABRI mulai disusun dan dikonsepsikan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 12 November 1958, akan tetapi baru di terapkan pada masa pemerintahan orde baru dan dilegalkan oleh Suharto pada tahun 1982 melalui UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia. Sistem perwakilan fungsional dan ideologi yang kemudian pada masa orde baru dikenal dengan dwifungsi ABRI.

Sejak saat itu, angkatan darat secara serius mengembangkan gagasan gagasan itu. Dikalangan pimpinan angkatan darat, muncullah beberapa perwira militer yang bertekad untuk memanfaatkan militer melalui mekanisme dwifungsi, sebagai motor penggerak pembangunan. Untuk mengamankan kepentingan militer dalam percaturan politik nasional, Para petinggi ABRI tersebut berpendapat bahwa ABRI harus terwakili dalam paerlemen pemerintahan. ABRI harus diberikan kesempatan untuk mempengaruhi perancangan garis besar kebijaksanaan negara<sup>25</sup>.

Pada masa awal 1970an, penerapan dwifungsi ABRI atau keterlibatan aktif ABRI dalam kegiatan politik dan ekonomi adalah lumrah dan diperlukan dikarenakan ABRI dipandang sebagai kelompok yang mampu mengatasi semua permasalahan yang



---

Reeve, *GOLKAR Sejarah yang hilang*, 177 – 178.  
Mochtar Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik*, (LP3ES, 1989) 137 – 142.

ada di masyarakat. ABRI juga satu satunya merupakan organisasi politik modern yang tersedia bagi Jenderal Suharto untuk mengerahkan dukungan masyarakat ke pemerintah. Dalam prakteknya, para perwira ini menganggap perlunya pengendalian posisi posisi politik dan ekonomi oleh ABRI untuk menjamin keberhasilan orde baru<sup>26</sup>. Selama perkembangan golongan fungsional tersebut, pimpinan angkatan darat telah membentuk suatu koalisi yang besar yang terdiri dari golongan fungsional yang ada di dalam DPR – GR yang kemudian tergabung dalam satu nama bersama yaitu SEKBER GOLKAR<sup>27</sup>. Memasuki tahun 1970an, focus utama pemerintah yaitu melaksanakan pemilu yang sempat tertunda. Pemilu ini dilaksanakan pada 1971. Golongan Karya keluar sebagai pemenang pemilu 1971 mengalahkan partai partai besar yang menjadi pemenang di pemilu 1955.

Pasca pemilu 1971 yang dimenangkan oleh golongan karya, partai partai lain harus mengikuti pembagian yang disarankan oleh pemerintah ke mereka yaitu mereka harus dilebur menjadi satu partai politik atau yang disebut dengan fusi partai. Empat partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan lima partai lainnya, di lebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Diberlakukannya kebijakan Fusi partai ini didasari oleh tidak stabilnya politik pada masa orde baru yang disebabkan oleh sistem kepartaian. Selain itu, partai politik pada era orde baru



---

Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik*, 143.

Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik*, 164.

sangatlah banyak, sehingga memunculkan banyak ideologi sekaligus kepentingan partai<sup>28</sup>.

Memasuki tahun 1980an, kembali dilaksanakan pemilu ketiga pada 4 mei 1982. Pemilu 1982 dapat berjalan dengan baik daripada pemilu sebelumnya, akan tetapi dari segi partai peserta pemilu mengalami konflik yang membuat persiapan kurang maksimal. Sebagaimana PDI yang mengalami konflik internal, PPP hampir mengalami perpecahan sementara golongan karya masih kokoh dengan persiapan untuk ikut bertempur dalam kontes pemilu. Pemilu 1982 kembali dimenangkan oleh Golongan Karya<sup>29</sup>.

Periode 1980an ini bisa dikatakan sebagai masa keemasan orde baru. Stabilitas ekonomi yang meningkat dan jaminan keamanan yang terjamin. Masyarakat pun mulai sejahtera. Pada periode ini juga tepatnya tahun 1984 terjadi swasembada pangan yang menjadikan Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar di dunia.

Memasuki tahun 1987, ABRI mulai mengendurkan pengaruhnya di dunia politik khususnya dalam pemilu 1987. ABRI mengambil sikap tersebut untuk mengambil hati rakyat dan apa yang terbaik bagi rakyat. Kesan bahwa militer telah melakukan langkah positif dengan menempatkan diri sebagai stabilisator yang terlihat nyata menjelang



---

David Reeve, *GOLKAR : Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran & t*, (Komunitas bambu, 2013), 351.

Majid, A dkk “Sistem pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia : rde Lama, Orde Baru dan Reformasi” *Qaumiyyah : Jurnal Hukum Tata* 2021) Hal : 9

pemilu 1987. Dalam menghadapi pemilu, ABRI menarik diri dari kepemimpinan salah satu partai dan menempatkan diri di Tengah tiga kekuatan peserta pemilu 1987. Pemilu 1987 ini dilaksanakan pada 23 april 1987. Pemilu ini kembali dimenangkan oleh golongan karya karena mendapatkan dukungan kuat dari birokrasi<sup>30</sup>.

## 2.2 Kondisi Politik di Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah 1971

Sulawesi Selatan merupakan daerah yang terus menerus dilanda kekacauan keamanan. Selama penjajahan kolonial Belanda, pergolakan pergolakan tidak ada habisnya. Silih berganti pergolakan tersebut berdatangan. Belum sempat merasakan ketenteraman pasca kemerdekaan, Sulawesi Selatan dilanda lagi kekacauan akibat larinya Kahar Muzakkar masuk hutan pada 1951. Kekacauan ini berlangsung selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Tak berhenti disitu, Sulawesi Selatan kembali mengalami peristiwa PERMESTA (Perjuangan Rakyat Semesta) yang di proklamasikan di Makassar pada 2 maret 1957. Gerakan ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh militer dan sipil di Indonesia Timur, termasuk Letkol Sumual, yang menuntut otonomi daerah yang lebih luas, keadilan ekonomi, dan reformasi politik di tingkat nasional. Meskipun awalnya bersifat gerakan politik yang menuntut, Permesta kemudian berkembang menjadi perlawanan bersenjata.

Selain kekacauan, pelarangan Masyumi menciptakan perubahan peta politik di Sulawesi Selatan. Masyumi dianggap sering bertentangan dengan



---

Nisa, N, I “*Strategi Pemenangan Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum 1971 – 1997*” (2016) Hal 51

Sukarno sehingga Agustus 1960, Sukarno meminta Masyumi untuk membubarkan diri, kalau tidak maka akan dibubarkan. Pada Akhirnya, Masyumi menyatakan diri untuk bubar pada 13 September 1968<sup>31</sup>.

Pembubaram Masyumi ini menjadi awal berubahnya peta politik di Sulawesi Selatan karena berdasarkan hasil pemilu 1955, kekuatan Masyumi di Sulawesi Selatan sangat besar dibandingkan dengan partai agama dan nasionalis lainnya. Pemilu tahun 1955 di Sulawesi Selatan yang unggul dan saling berkejaran perolehan suaranya hanyalah Masyumi, NU, dan PSII<sup>32</sup>.

Sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, lembaga lembaga dan perangkat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah daerah terpaksa mengalami penataan dan penyesuaian kembali. DPR dan DPRD hasil dari pemilu 1955, yang anggotanya berasal dari partai partai politik yang ikut pemilu, harus ditata ulang keanggotaannya untuk disesuaikan dengan sistem baru berdasarkan UUD 1945<sup>33</sup>. Pasca dekrit presiden tersebut, partai partai politik mulai melebarkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan melalui surat kabar dan tokoh masyarakat yang dikuasainya. Mereka ingin menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah dominan bagi mereka, akan tetapi mereka tidak

---

<sup>31</sup> Alim Bathoro, “Redupnya Peran Politik Islam di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi oleh Soekarno)”, *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2, (2018), 32.

Zainuddin Taha, *Sulawesi Selatan dari A. Achmad Rifai ke Achmad Lamo 1970* (Makassar : Badan Penerbit UNM, 2017), 23 – 50.

Taha, *Sulawesi Selatan dari A. Achmad Rifai ke Achmad Lamo 1960 –*



berhasil menggoyahkan kekuatan posisi parati partai politik yang berbasis agama di Sulawesi Selatan<sup>34</sup>.

Permulaan tahun 1960 merupakan awal dari penguasaan militer, yang pada posisi pejabat-pejabat pemerintahan diduduki oleh golongan militer, misalnya Gubernur Sulawesi Selatan dari kalangan militer, begitupun pada daerah tingkat II seperti Walikota Makassar dan Walikota Parepare. Banyaknya keterlibatan militer dalam dunia pemerintahan hal ini sangat menguntungkan bagi militer di Sulawesi Selatan, harmonisasi hubungan antara militer dengan kalangan sipil yang terbangun sejak awal revolusi tidak pernah mengalami gangguan yang berarti serta membuka peluang yang berarti bagi perwira-perwira Bugis dan Makassar untuk mengisi posisi-posisi penting dalam jajaran militer<sup>35</sup>.

Pada tahun 1965 setelah terjadinya kekacauan di Indonesia, Presiden Sukarno di gantikan oleh Jenderal Soeharto. Pemerintahan Soeharto yang dikenal otoriter dan sebagai masa orde baru yang mana kekuasaan militer lebih dominan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Memasuki tahun 1971, fokus utama pemerintah saat itu adalah untuk menyelenggarakan kembali pemilu yang sempat tertunda.

---

<sup>34</sup> Taha, *Sulawesi Selatan dari A. Achmad Rifai ke Achmad Lamo 1960 –*

Dias Pradadimara, “Kronika Sulawesi Selatan di tahun 1950-an,” dalam ladimara, M. Bahar AkkaseTeng, Heri Kusuma Tarupay (penyunting), *an Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. (Yogyakarta: 2014), hlm. 25



Golongan Karya keluar sebagai pemenang pemilu 1971 mengalahkan partai partai besar yang menjadi pemenang di pemilu 1955. Kemenangan Golongan Karya ini menjadi tanda bahwa kuatnya dominasi militer dalam perpolitikan di Sulawesi Selatan. Sejak saat itu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan didominasi oleh orang orang militer. Saat itu, yang menjadi Gubernur di Sulawesi Selatan adalah Letnan Kolonel Ahmad Lamo (1966 – 1977)<sup>36</sup>.

Pasca pemilu 1971 yang dimenangkan oleh Golongan Karya, partai partai lain harus mengikuti pembagian yang disarankan oleh pemerintah ke mereka yaitu mereka harus dilebur menjadi satu partai politik atau yang disebut dengan fusi partai. Empat partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan lima partai lainnya, di lebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Diberlakukannya kebijakan Fusi partai ini didasari oleh tidak stabilnya politik pada masa orde baru yang disebabkan oleh sistem kepartaian. Selain itu, partai politik pada era orde baru sangatlah banyak, sehingga memunculkan banya ideologi sekaligus kepentingan partai<sup>37</sup>.

Sulawesi Selatan juga kena dampak dari kebijakan fusi partai ini. Partai lokal dari cabang partai nasional harus menyesuaikan diri dengan penggabungan partai partai tersebut. Misalnya seperti kader kader yang berasal dari partai agama, harus



---

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan “*Sejarah  
ingan Pemerintahan*” (1991), 485.  
David Reeve, *GOLKAR : Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran &  
t*, (Komunitas bambu, 2013) , 351.

menyesuaikan diri bergabung kedalam partai PPP, begitu juga dengan partai nasional yang harus menyesuaikan diri bergabung ke PDI. Setelah fusi partai, Golongan Karya mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu 1977. Pemilu kedua orde baru ini kembali dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu ini diikuti oleh tiga peserta pemilu saja (PPP, PDI, Golongan Karya) karena sebelumnya telah dilakukan penyederhanaan partai. Tahun berikutnya, Andi Oddang yang juga merupakan anggota dari militer terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (1978 – 1983).

Memasuki tahun 1980an merupakan masa keemasan orde baru. Tahun 1982 kembali dilaksanakan pemilu yang ketiga di masa orde baru. Pemilu ini lagi dan lagi dimenangkan oleh Golongan Karya. Hingga pada tahun 1983, diangkatlah Ahmad Amiruddin, mantan Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (1983 – 1993)<sup>38</sup>. Unikny, Ahmad Amiruddin merupakan orang sipil yang bukan dari kalangan militer.

Untuk tujuan peningkatan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan, rezim orde baru melakukan eksperimen politik yang cukup radikal, yaitu mengangkat orang sipil Prof. Dr. Ahmad Amiruddin yang berasal dari kampus menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode (1983-1993). Mantan Rektor Universitas Hasanuddin dua periode ini membuktikan kepada Suharto bahwa orang sipil bisa memimpin daerah. Ahmad Amiruddin tampil sebagai Gubernur yang



---

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan, *Sejarah  
ngan Pemerintahan*, (1991), 529.

membangungkan di kancah nasional dengan konsep utamanya; Tri konsep (perubahan pola pikir, petik olah jual, dan pengwilayahan komoditas)<sup>39</sup>. Selama menjabat, Ahmad Amiruddin berhasil membantu pemerintahan orde baru mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Hingga pada tahun 1987, pemilu keempat kembali dilaksanakan dan yang kembali mememangkan pemilu tersebut adalah Golongan Karya.

### 2.3 Lahirnya Golongan Karya di Sulawesi Selatan

Sekitar tahun 1950 sampai 1965, di daerah Sulawesi Selatan terjadi pertentangan antar elit politik yang didasarkan atas perbedaan aliran politik. Disamping itu juga terjadi pemberontakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Semesta) di Sulawesi Selatan. Terjadi juga konflik antar partai yang berasaskan aliran politik dalam mendapatkan kekuasaan, baik sebelum maupun sesudah Pemilu tahun 1955. Partai politik yang beraliran politik Islam, seperti Masyumi, NU dan PSII bersaing dengan partai politik yang beraliran nasionalis dan komunis dalam memenangkan pemilu 1955<sup>40</sup>.

Ketika di Sulawesi Selatan terjadi banyak kerusuhan, mulai dari DI/TII yang di pimpin oleh Kahar muzakkar sampai Permesta, maka ABRI menyepakati bahwa, kekuatan PKI harus dilawan menggunakan perlawanan yang modern yaitu membentuk



---

Imam Mujahidin Fahmid, dkk “Pasang Surut Polarisasi Elit Di Dalam Etnis n Makassar”, *Jurnal Fakultas Ekologi Manusia IPB* 06, no. 02 (2012), 8.  
Jayadi Nas, “Konflik antar elite politik lokal di Sulawesi Selatan : Sebuah f Sejarah”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Kemanusiaan* 2, no. 7 (2014), 10.

organisasi tandingan. Maka ketika itu ABRI langsung membentuk tiga organisasi dan memensiunkan tiga tentara aktif untuk di jadikan ketua organisasi. Organisasi tersebut ialah SOKSI yang diketuai oleh Mayor Jend. Suhardiman, Mayor Jend. Sugandi di MKGR, dan Mayor Jend. Isman di KOSGORO. SOKSI menyari anggota di sektor karyawan/buruh. MKGR pada sektor Birokrasi/Pegawai Negri. KOSGORO pada sektor Informal/Masyarakat sipil biasa<sup>41</sup>.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, pada awal terbentuknya, Golongan Karya memerangi tiga hal yaitu kemiskinan, keterbelakangan pendidikan yang dimana masyarakat pada saat itu 70 – 80% mengalami buta huruf, dan bagaimana membangun kemandirian masyarakat. Dalam pemerintahan golongan karya, ada yang disebut dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Di Sulawesi Selatan, seluruh pemerintahan golongan karya memiliki tujuan sampai lebih dari setengah penduduk di Indonesia sejahtera dalam hal ini tidak ada lagi kemiskinan, ekonomi mulai membaik, pendidikan dan kemandirian masyarakat juga meningkat<sup>42</sup>.

Sama halnya dengan pusat, Sekber Golkar di Sulawesi Selatan awalnya di pelopori oleh tiga organisasi yaitu SOKSI, MKGR, KOSGORO. Ketiga organisasi tersebut di



---

Wawancara dengan bapak La Kama Wiyaka (Anggota DPRD kota  
· 1997 – 1999 dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1999 – 2004)  
t di kantor Golkar Sulawesi Selatan.  
Wawancara, *La Kama Wiyaka*

pimpin oleh tiga orang yang berlatar belakang berbeda, Soksi saat itu di Sulawesi Selatan diketuai oleh Edy Baramuli yang merupakan seorang sipil, MKGR saat itu di Sulawesi Selatan diketuai oleh Musu daeng Sipato yang juga seorang sipil, sedangkan Kosgoro saat itu di Sulawesi Selatan diketuai oleh M. Yasin Limpo yang berasal dari kalangan militer. Sehingga isi anggota dari sekber golkar tersebut merupakan seluruh dari organisasi yang tergabung di dalamnya. Anggota DPR Golongan Karya juga diambil dari anggota organisasi yang tergabung di dalamnya<sup>43</sup>.

Dengan adanya SOKSI, MKGR, dan KOSGORO, maka ABRI merasa kekuatannya besar dan menguasai tiap tiap kelompok masyarakat. Kemudian, pada 20 Oktober 1964 ketiga organisasi tersebut membentuk satu kantor bersama yang disebut SEKBER GOLKAR. Hingga pada tahun 1965, semakin banyak organisasi yang berafiliasi kedalam sekber Golkar. Sebanyak 64 buah organisasi pada tahun 1965, selanjutnya jumlah tersebut bertambah menjadi 128 organisasi di tahun 1966, tahun 1967 menjadi 252 organisasi hingga pada akhir tahun 1969 ada 200 organisasi fungsional yang tergabung ke dalam sekber Golkar<sup>44</sup>. Kaum militer memanfaatkan organisasi ini sebagai basis dukungan massa. Dengan begitu, mulailah militer untuk



Wawancara dengan Dra. Hj. Siti Hadrah, MM (Anggota DPRD Tingkat 1 Selatan 1982 – 1992 & Anggota DPRD Tingkat 2 Kota Makassar 1971 –

Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta : PT rajagrafindo persada,

mengelompokkan organisasi organisasi ini ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO)<sup>45</sup> pada 1969<sup>46</sup>.

Hingga pada pemilu 1971, Golongan Karya diikutkan pemilu 1971 padahal pada saat itu Sekber Golkar bukan partai akan tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar di Indonesia. Status sekber Golkar pada saat itu adalah wadah berhimpun bagi masyarakat yang berorientasi pada kekaryaan. Setelah kemenangan pemilu 1971, mulai juli hingga desember 1971, Sekber Golkar di restrukturisasi kembali, kino kino dihapuskan. Sekber Golkar diubah nama menjadi “Golongan Karya” saja<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> 7 KINO tersebut adalah Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), Gerakan

unan Untuk menghadapi Pemilu 1971.

Rodee, C Dkk, *Pengantar Ilmu Politik* ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, m. 488

David Reeve, *GOLKAR : Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran & t*, (Komunitas bambu, 2013), 318.



Bersamaan dengan itu, Sulawesi Selatan segera menunjuk Abdul Rahim Manji yang berasal dari kalangan militer untuk menjadi ketua umum Golongan Karya periode 1971 – 1977.

Foto 1

Abdul Rahim Manji sebagai Ketua Umum Golongan Karya Sulawesi Selatan

1971 - 1977



Sumber : Kantor DPD Tingkat Satu Partai Golkar Sulawesi Selatan



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)